A. **PEMAHAMAN PENGELOLA MUSEUM TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG MUSEUM SEBAGAI PENUNJANG PROSES BELAJAR-MENGAJAR (MENYAMAKAN PERSEPSI ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PENGELOLA MUSEUM)**

1. Masalah kelembagaan: Menghimbau pemerintah/daerah untuk kiranya dapat menyesuaikan nomenklatur daerah, dapat memisahkan Satker kebudayaan dengan pariwisata agar museum dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Diharapkan dapat membentuk nomenklatur baru, yaitu bidang/ seksi yang khusus menangani masalah museum dan permuseuman pada dinas terkait.
3. Diharapkan instansi terkait, seperti pemerintah dan pihak museum itu sendiri untuk menyamakan visi dan misi sebagai sarana pendukung disamping sebagai media belajar.
4. Menentukan kebijakan mengenai standarisasi kepala dan pengelola museum harus sesuai dengan disiplin ilmu.
5. Perlu adanya lembaga/ badan sertifikasi untuk pengelola museum agar lebih jelas dan profesional.
6. Perlu adanya kebijakan pengembangan karir terhadap pegawai permuseuman.
7. Perlunya upaya penyetaraan SOTK Permuseuman di setiap provinsi, kota dan kabupaten.
8. Pemda mendukung standarisasi museum.
9. Pemerintah daerah menjadikan kunjungan museum sebagai muatan lokal di seluruh tingkatan sekolah, jika memungkinkan sampai dengan tingkat perguruan tinggi.
10. Museum ikut andil dalam pengembangan program sektor kepariwisataan.
11. Tidak adanya intervensi serta aktivitas politik dalam hal pengembangan/ kreativitas museum.
12. Dalam hal menggaungkan kembali sasaran “GNCM” sosialisasi museum tidak hanya diberikan kepada pelajar, namun perlu juga kepada para pejabat daerah (unsur Forkompimda).
13. UU Cagar Budaya dan PP 66 tahun 2015 tentang Museum dapat dilaksanakan secara konsisten.

B. IMPLIKASI PENGEMBANGAN MUSEUM SEBAGAI PENUNJANG PROSES BELAJAR-MENGAJAR YANG DIJALANKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP MASYARAKAT

1. Mengubah image museum yang dianggap kuno menjadi lebih kekinian (berinovasi).
2. Menjadikan agenda tetap bagi sekolah untuk wajib mengunjungi museum, dipertegas dengan komitmen kepala daerah sebagai agenda Kurikulum Nasional (bagian yang tidak terpisahkan).
3. Menjadikan “wajib kunjung museum” dengan sasaran peserta diklatpim IV, III dan II atau diklat sejenis yang menunjang kompetensi ASN.
4. Museum melengkapi sarana prasarana sebagai penunjang proses belajar mengajar.
5. Merubah mindset mengenai museum yang seram dan suram dengan menggunakan IT berikut operator sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
6. Melaksanakan program teknis sesuai dengan jenis kekhususan museum.
7. Meningkatkan kompetensi pemandu museum dalam membantu proses belajar mengajar saat berkunjung ke museum.
8. Mengadakan/ mengembangkan event dengan menggandeng mitra kerja serta CSR di museum (baik outdoor maupun indoor) sesuai dengan visi misi museum.

C. SARAN STRATEGI PENGEMBANGAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH TERKAIT MUSEUM SEBAGAI PENUNJANG PROSES BELAJAR-MENGAJAR

1. Perlu mata anggaran yang menitikberatkan pada pengalokasian sarana dan program museum.
2. Kebijakan pemerintah daerah yang konsisten pada museum
3. Bekerjasama dengan media (cetak dan elektronik) baik berbayar ataupun tidak berbayar, komunitas, dan antar lembaga.
4. Membuat peraturan daerah yang sesuai dengan UU kebudayaan.
5. Menggunakan endorser dari ketokohan daerah (pemimpin daerah yang terkenal) dan atau public figure untuk pencitraan museum.
6. Pemerintah daerah mematuhi peraturan UU mengenai kewajibannya membantu memberikan anggaran ke museum baik itu swasta maupun negeri
7. Menyediakan ruang publik yang multifungsi di museum (indoor maupun outdoor).
8. Bekerjasama dengan pemda dengan mengadakan duta museum dalam ajang-ajang pemilihan.
9. Mengarahkan kegiatan pemerintah yang ada kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar di museum.
10. Setiap museum agar kiranya dapat membuat MOU dengan stake holder pariwisata dan dunia pendidikan (Asita, PHRI, HPI, Sekolah).
11. Perlunya penguatan literasi melalui kajian dan study koleksi perpustakaan yang bekerja sama dengan Perpusnas, IKAPI, ANRI.